

**Meningkatkan Kompetensi Kepala Sekolah dalam Pengelolaan Sekolah
Melalui Pendampingan PKKS pada Tujuh SMA/SMK Binaan di Kulon Progo
Semester 1 Tahun 2014/2015**

Giyarsih

Pengawas SMA/SMK Kabupaten Kulon Progo
asih125@yahoo.co.id

Abstrak

Judul karya tulis ilmiah yang berisikan penelitian tindakan sekolah di atas, bertujuan mendiskripsikan kinerja kepala sekolah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya khususnya pada tugas manajerial, dan supervisi pada tujuh sekolah binaan pengawas sekolah di Kabupaten Kulon Progo, yaitu SMK Negeri 1 Temon, SMK Ma'arif 2 Temon, SMK Muhammadiyah 1 Temon, SMK Muhammadiyah 1 Wates, SMA Muhammadiyah Galur, SMA Negeri Girimulyo dan SMK Negeri Kokap. Metode yang digunakan adalah studi dokumen, wawancara, menilai diri sendiri, monitoring dan evaluasi, dengan menggunakan instrumen PKKS baku/standar. Teknik analisis data menggunakan analisis statistik deskriptif. Hasil penilaian ini menunjukkan bahwa rata-rata tingkat pencapaian kinerja kepala sekolah rata-rata baik (82). Dari tujuh kepala sekolah, tujuh orang dinilai kinerjanya dengan hasil empat orang dengan kategori Baik (76-90), dan 1 orang kategori cukup (65-75). Dua kepala sekolah tidak dikinerja karena sebagai pelaksana tugas harian dan kepala sekolah baru. Terdapat empat indikator kinerja yang secara umum belum baik yaitu: 1). Kepala sekolah dalam melakukan pembinaan prestasi unggulan dan pelacakan terhadap alumni (indikator lima sebesar 70%; 2). Kepala sekolah dalam menindaklanjuti hasil supervise (indikator 16 sebesar 65%); 3). Kepala sekolah dalam melakukan evaluasi diri sekolah (EDS) (indikator 17 sebesar 65%); 4). Kepala sekolah dalam pendayagunaan pencapaian prestasi pendidik dan tenaga kependidikan (indikator 18sebesar 70%). Tindak lanjut terhadap hasil kinerja kepala sekolah yaitu perlu dilakukan pelatihan Pengelolaan Sekolah, pengembangan dimensi kompetensi manajerial dan supervisi bagi kepala sekolah yang nilai kinerjanya belum baik oleh Dinas Pendidikan terkait. Kepala sekolah yang nilai kinerjanya sudah baik dapat diperhitungkan dalam usul kenaikan pangkat.

Kata Kunci: Kompetensi, Kinerja Kepala Sekolah, Pengelolaan Sekolah, Pendampingan

PENDAHULUAN

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya menjelaskan bahwa penilaian kinerja guru yang memiliki tugas tambahan sebagai kepala sekolah/ madrasah meliputi enam komponen penilaian, yaitu kepribadian dan sosial, kepemimpinan pembelajaran, Pengelolaan Sekolah /madrasah, manajemen sumber daya,

kewirausahaan, dan supervisi pembelajaran. Dan penilaian kinerja guru yang mendapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah yang didasarkan pada Permendiknas ini berlaku secara efektif mulai tanggal 1 Januari 2013.

Namun pada kenyataannya saat ini tidak setiap kepala sekolah menyambut serius tentang penilaian kinerja guru yang mendapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah yang lebih dikenal dengan istilah Penilaian Kinerja Kepala Sekolah (PKKS). Pada hal Balai Pendidikan

Menengah khususnya Kabupaten Kulon Progo sebagai unsur pembina seluruh satuan pendidikan di tingkat kabupaten/kota sudah melaksanakan Penilaian Kinerja Kepala Sekolah (PKKS) secara sistematis dengan menggunakan instrumen penilaian yang standar/baku. Hal ini dikhawatirkan akan berdampak buruk terhadap pencapaian kualitas pendidikan dalam standar nasional pendidikan jika tidak segera ditindak lanjuti. Untuk itu pengawas sekolah sesuai dengan tugas pokoknya berdasarkan Permenpan dan Reformasi Birokrasi No. 21 tahun 2010, perlu melakukan penilaian kinerja terhadap semua guru yang mendapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah, sehingga hasil penilaian ini dapat bermanfaat untuk meningkatkan kompetensi kepala sekolah dalam melakukan Pengelolaan Sekolah. Yang secara tidak langsung kualitas sekolah akan terukur melalui PKKS, disamping itu nilai hasil PKKS bagi guru/kepala sekolah dapat dipakai dalam mengajukan usul kenaikan pangkat untuk memenuhi angka kreditnya.

Dari semua persoalan di atas berdasarkan peraturan-peraturan yang telah diuraikan maka perlu adanya pendampingan terhadap kepala sekolah dalam mempersiapkan PKKS.

Pengertian Kompetensi Kepala Sekolah

Berdasarkan peraturan menteri pendidikan nasional nomor 13 tahun 2007 tentang standar kepala sekolah/madrasah telah ditetapkan ada 5 dimensi kompetensi kepala sekolah yaitu: 1. Kepribadian, 2. Manajerial, 3. Kewirausahaan, 4. Supervisi, 5. Sosial. Dari kelima kompetensi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Kompetensi Kepribadian

Adapun kompetensi kepribadian meliputi sebagai berikut:

1. Berahlak mulia dan menjadi teladan bagi komunitas sekolah.
2. Memiliki integritas kepribadian sebagai pemimpin.

3. Memiliki keinginan yang kuat dalam pengembangan diri.
4. Bersikap terbuka dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.
5. Mengendalikan diri terhadap masalah.
6. Memiliki bakat dan minat jabatan sebagai pemimpin pendidikan.

Keenam faktor diatas sangat menentukan kompetensi lainnya, maka kepala sekolah harus mampu menunjukkan kinerjanya berdasarkan kebijakan, perencanaan dan program pendidikan.

Dalam rangka mewujudkan kinerja kepala sekolah, kompetensi kepribadian dengan sub kompetensi memiliki keinginan yang kuat dalam pengembangan diri sebagai kepala sekolah tidak hanya dituntut untuk melakukan tugas-tugas diluar kebutuhan dirinya sendiri, tetapi ia perlu juga memiliki kemampuan dalam mengembangkan dirinya sendiri. Kompetensi ini bisa diwujudkan jika ia mampu untuk (a) mengidentifikasi karakteristik kepala sekolah tangguh (efektif). (b) niaspada pemberdayaan, pemrograman pengevaluasian) (d) mengembangkan dirinya pada lingkungan (waktu, tempat, sumber daya dan kelompok kepentingan) (e) mengembangkan ketrampilan personal yang meliputi organisasi diri, hubungan antara manusia, pembawaan diri, pemecahan masalah, gaya bicara dan gaya menulis.

Kompetensi Manajerial

Sesuai dengan keputusan mendiknas tersebut diatas, maka kepala sekolah harus mampu dan melihat kinerjanya dalam bidang manajerial sebagai berikut:

1. Menyusun perencanaan sekolah/ madrasah untuk berbagai tingkatan perencanaan.
2. Mengembangkan organisasi sekolah/madrasah sesuai dengan kebutuhan.
3. Memimpin sekolah/madrasah dalam rangka pendayagunaan sumber daya manusia sekolah/madrasah secara optimai.

4. Mengelola perubahan dan Pengelolaan Sekolah /madrasah menuju organisasi pembelajaran yang efektif.
5. Menciptakan budaya dan iklim sekolah/madrasah yang kondusif dan inovatif bagi pembelajaran peserta didik.
6. Mengelola guru dan staf dalam rangka pendayagunaan sumber daya manusia secara optimal.
7. Mengelola sarana dan prasarana sekolah/madrasah dalam rangka pendayagunaan secara optimal.
8. Mengelola hubungan sekolah/madrasah dengan masyarakat dalam rangka pencarian dukungan ide, sumber belajar, dan pembiayaan sekolah/madrasah.
9. Mengelola peserta didik dalam rangka penerimaan peserta didik baru, penempatan dan pengembangan kapasitas peserta didik.
10. Mengelola pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran sesuai dengan arah dan tujuan pendidikan nasional.
11. Mengelola keuangan sekolah/madrasah sesuai dengan prinsip pengelolaan yang akuntabel, transparan dan efisien.
12. Mengelola ketatausahaan sekolah/madrasah dalam mendukung pencapaian tujuan sekolah/madrasah.

Kompetensi Kewirausahaan

Keberhasilan kompetensi kepala sekolah yang cukup sentral dan merupakan pokok dari keberlanjutan program sekolah diantaranya adalah kompetensi kewirausahaan, sebagai salah satu cara bagaimana sekolah mampu mewujudkan kemampuan.

Dalam kewirausahaannya ini, maka kepala sekolah harus mampu menunjukkan kemampuannya dalam menjalin kemitraan dengan pengusaha atau donatur, serta mampu memandirikan sekolah dengan upaya berwirausaha.

Secara rinci kinerja kepala sekolah terhadap kompetensi kewirausahaan sebagai berikut:

1. Menciptakan inovasi yang berguna bagi Pengelolaan Sekolah /madrasah;
2. Bekerja keras untuk mencapai keberhasilan sekolah/madrasah sebagai organisasi pembelajar yang efektif;
3. Memiliki motivasi yang kuat untuk sukses dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pemimpin sekolah/madrasah;
4. Pantang menyerah dan selalu mencari solusi terbaik dalam menghadapi kendala yang dihadapi sekolah/madrasah;
5. Memiliki naluri kewirausahaan dalam mengelola kegiatan sekolah/madrasah sebagai sumber belajar peserta didik.

Berdasarkan uraian diatas, bahwa kompetensi kewirausahaan kepala sekolah harus mampu menunjukkan perilaku hidup hemat dalam mengelola sumber daya keuangan sekolah, sehingga mampu menciptakan inovasi yang berguna bagi Pengelolaan Sekolah .

Kompetensi Supervisi

Kompetensi supervisi ini sangat strategis bagi seorang kepala sekolah, khususnya salam memahami tugas dan fungsi kepala sekolah sebagai pemimpin:

1. Merencanakan program supervisi akademik dalam rangka peningkatan profesional guru
2. Melaksanakan supervisi akademik terhadap guru dengan pendekatan teknik supervisi
3. Menindaklanjuti hasil supervisi akademik terhadap guru dalam rangka peningkatan profesionalisme guru.

Kompetensi Sosial

1. Bekerja sama dengan pihak lain untuk kepentingan sekolah
2. Berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan
3. Memiliki kepekaan sosial terhadap orang atau kelompok lain.

Berdasarkan Permendiknas diatas salah satu tugas kepala sekolah adalah melaksanakan supervisi akademik. Untuk melaksanakan

supervisi secara akademik diperlukan keterampilan konseptual, interpersonal dan teknis (Glikman, et al: 2007). Oleh sebab itu setiap kepala SMK Negeri se Kabupaten Kulon Progo harus memiliki dan menguasai konsep supervisi akademik yang meliputi: pengertian, tujuan dan fungsi, prinsip-prinsip dan dimensi-dimensi substansi supervisi akademik.

Pengertian Pengelolaan Sekolah

Komponen Pengelolaan Sekolah digunakan Juknis Standar Pengelolaan yang menyebutkan bahwa Komponen Standar Pengelolaan Pendidikan terdiri dari:

- 1 Perencanaan Program (disusun dalam satu instruksi kerja): Visi Sekolah, Misi Sekolah, Tujuan Sekolah, dan Rencana Kerja Sekolah.
- 2 Pelaksanaan Rencana Kerja (disusun dalam satu petunjuk teknis tersendiri): Pedoman Sekolah, Struktur Organisasi Sekolah, Pelaksanaan Kegiatan Sekolah, Bidang Kesiswaan, Bidang Kurikulum dan Kegiatan Pembelajaran, Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Bidang Sarana dan Prasarana, Bidang Keuangan dan Pembiayaan, Budaya dan Lingkungan Sekolah, Peran serta Masyarakat dan Kemitraan Sekolah.
- 3 Pengawasan dan Evaluasi (disusun dalam satu petunjuk teknis tersendiri): Program Pengawasan, Evaluasi Diri, Evaluasi dan Pengembangan KTSP, Evaluasi pendayagunaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Akreditasi Sekolah/madrasah.
- 4 Kepemimpinan Sekolah (disusun dalam satu instruksi kerja)
- 5 Sistem Informasi Manajemen (disusun dalam satu instruksi kerja)

Jadi dalam Pengelolaan Sekolah kepala sekolah melaksanakan serangkaian kegiatan dari merencanakan program, melaksanakan rencana kerja, melakukan pengawasan dan evaluasi, melaksanakan kepemimpinan sekolah, dan memfasilitasi SIM. Dalam Pengelolaan Sekolah, Kepala Sekolah diharapkan dapat mengelola

sekolah sehingga sekolah meningkat dalam hal: SDM-nya yang semakin profesional. Manajemen yang efektif dan profesional, Lingkungan pendidikan yang kondusif, dan Kemampuan membangun kepercayaan kepada masyarakat.

Pengertian Pendampingan

Pendampingan merupakan suatu aktivitas yang dilakukan dalam rangka pembinaan, pengajaran, pengarahan dalam kelompok yang lebih berkonotasi pada menguasai, mengendalikan, dan mengontrol. Kata pendampingan lebih bermakna pada kebersamaan, kesejajaran, saling menyamping, dan karenanya kedudukan antara keduanya (pendamping dan yang didampingi) sederajat, sehingga tidak ada dikotomi antara atasan dan bawahan. Hal ini membawa implikasi bahwa peran pendamping hanya sebatas pada memberikan alternatif, saran, dan bantuan konsultatif dan tidak pada pengambilan keputusan (Moh. Muzaqi, 2004:5).

Menurut Yayasan Pulih (2011) disebutkan bahwa Pendampingan merupakan proses interaksi timbal balik (tidak satu arah) antara individu/ kelompok/ komunitas yang mendampingi dan individu/ kelompok/ komunitas yang didampingi yang bertujuan memotivasi dan mengorganisir individu/ kelompok/ komunitas dalam mengembangkan sumber daya dan potensi orang yang didampingi dan tidak menimbulkan ketergantungan terhadap orang yang mendampingi (mendorong kemandirian). Artinya upaya terus menerus dan sistematis dalam mendampingi (memfasilitasi) individu, kelompok maupun komunitas dalam mengatasi permasalahan dan menyesuaikan diri dengan kesulitan hidup yang dialami sehingga mereka dapat mengatasi permasalahan tersebut dan mencapai perubahan hidup ke arah yang lebih baik.

Pendampingan merupakan suatu aktivitas yang dilakukan dan dapat bermakna pembinaan,

pengajaran, pengarahan dalam kelompok yang lebih berkonotasi pada menguasai, mengendalikan, dan mengontrol. Kata pendampingan lebih bermakna pada kebersamaan, kesejajaran, samping menyamping, dan karenanya kedudukan antara keduanya (pendamping dan yang didampingi) sederajat, sehingga tidak ada dikotomi antara atasan dan bawahan. Hal ini membawa implikasi bahwa peran pendamping hanya sebatas pada memberikan alternatif, saran, dan bantuan konsultatif dan tidak pada pengambilan keputusan (BPKB Jawa Timur, 2001:5).

Jadi, pendampingan berarti bantuan dari pihak luar, baik perorangan maupun kelompok untuk menambahkan kesadaran dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan pemecahan permasalahan kelompok. Pendampingan diupayakan untuk menumbuhkan keberdayaan dan keswadayaan agar kepala sekolah yang didampingi dapat bekerja secara mandiri. Pendampingan merupakan kegiatan untuk membantu kepala sekolah binaan yang berangkat dari kebutuhan dan kemampuan kepala sekolah yang didampingi dengan mengembangkan proses interaksi dan komunikasi dari, oleh, dan untuk peningkatan kompetensinya serta mengembangkan kesetiakawanan dan solidaritas kepala sekolah dalam rangka mencapai kompetensinya.

Peran Pengawas dalam Pendampingan

Kepala Sekolah perlu didampingi karena agar mereka mampu mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan tupoksinya. Dikatakan mendampingi karena yang melakukan kegiatan pemecahan masalah itu bukan pendamping, melainkan pendamping hanya berperan untuk memfasilitasi bagaimana memecahkan masalah secara bersama-sama dengan kelompok guru-guru di sekolah binaan, mulai dari tahap mengidentifikasi permasalahan, mencari alternatif pemecahan masalah, sampai pada implementasinya.

Berbagai upaya untuk meningkatkan kompetensi kepala sekolah telah banyak dilakukan, baik oleh pemerintah maupun oleh berbagai pihak yang peduli terhadap kemajuan sekolah. Berbagai upaya tersebut antara lain dalam bentuk: (1) penataran/ pendampingan kepala sekolah, (2) kualifikasi pendidikan guru yang mendapat tugas tambahan, (3) pembaharuan kurikulum, (4) implementasi pelaksanaan kurikulum 2013, (5) penilaian diri yang dilakukan oleh sekolah. Namun berbagai upaya tersebut belum mencapai hasil yang optimal, karena berbagai kendala di lapangan. Akibatnya, sampai saat ini kualitas sekolah di Indonesia masih rendah.

Jadi pendampingan perlu dijalankan dengan baik dan benar agar kepala sekolah yang didampingi merasa nyaman, tertarik, dan tertantang untuk melakukan inovasi dengan penuh percaya diri. Pendampingan yang berhasil adalah pendampingan yang membuat kepala sekolah yang didampingi merasa bahwa pendampingan merupakan suatu dukungan profesional yang benar-benar dibutuhkan. Pendampingan oleh pengawas kepada kepala sekolah merupakan unsur penting untuk menjamin kepala sekolah bersedia, berani, dan mampu menjalankan inovasi kepemimpinan. Pendampingan bisa berjalan dengan baik bila pendamping mengetahui praktik manajerial yang biasa dilakukan kepala sekolah serta mengetahui cara memberikan pendampingan yang baik.

METODE

Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan sekolah dengan menggunakan pendekatan andragogi, yang dilakukan pada tujuh kepala sekolah binaan di SMK Kabupaten Kulon Progo Semester 1 Tahun Pelajaran 2014/2015. Cara pelaksanaannya yaitu: melakukan analisis dan evaluasi terhadap hasil PKKS yang dilakukan tim PKKS, lalu dilihat kelebihan dan

kekurangan, kemudian melakukan perubahan-perubahan, pendampingan, dan pembinaan yang berfungsi sebagai peningkatan. Tindakan penelitian ini dilakukan dengan pendampingan berkelanjutan mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Langkah pendampingan adalah sebagai berikut.

Tahap Perencanaan

Sebelum dilakukan pendampingan, langkah awal yang dilakukan adalah kros cek nilai perolehan hasil PKKS masing-masing kepala sekolah binaan. Nilai hasil PKKS tahun kemarin dipakai sebagai nilai pra siklus.

Dari hasil tersebut kepala sekolah dipandu pengawas untuk mencermati perolehan nilai dari masing-masing komponen, indikator, dan sub indikator. Pengawas melakukan tindak lanjut berupa pendampingan PKKS dengan melakukan koordinasi jadwal pendampingan.

Dari hasil diskusi, ditentukan langkah berikutnya yang disepakati bersama untuk mengadakan pendampingan tentang Pengelolaan Sekolah, dan PKKS terhadap seluruh warga sekolah. Setelah terjadi koordinasi dilakukan pendampingan terhadap setiap komponen bimbingan dari Kepribadian, Sosial, Kepemimpinan Pembelajaran, Pengelolaan Sekolah, Manajemen Sumber Daya, Kewirausahaan (KWU), Supervisi Pembelajaran, dan Penampilan, Pelayanan, Prestasi. Dijelaskan bukti fisik pendukung untuk masing-masing komponennya. Kepala sekolah mengadakan rapat koordinasi untuk mempersiapkan bukti fisik dengan jalan membagi tugas ke guru-guru sesuai dengan keahliannya. Setelah bukti fisik disiapkan, langkah selanjutnya Kepala sekolah mengundang pengawas Pembina untuk melakukan pendampingan terhadap data pendukung yang sudah ada.

Tahap Pelaksanaan

Pendampingan ini dilakukan pada pertemuan pertama siklus pertama dan siklus ke-dua.

Dalam tahap ini terjadi diskusi dan konsultasi tentang hal-hal yang sudah disiapkan atau hal-hal yang belum dipahami. Setelah mengetahui apa saja yang belum dibuat, yang bersangkutan mencari bukti fisik yang masih kurang. Pada tahap ini pengawas Pembina bisa melakukan pendampingan menggunakan instrument pendampingan PKKS.

Tahap Observasi

Pada pertemuan ke-dua siklus pertama dan ke-dua dilakukan penilaian terhadap Pengelolaan Sekolah, dan PKKS menggunakan instrument yang sudah disepakati.

Tahap Refleksi

Pada tahap ini dilakukan wawancara dengan guru, kepala sekolah, dan siswa, disamping itu digali data tentang kepribadian, social, dan KWU menggunakan angket yang diberikan kepada guru, kepala sekolah, siswa, dan komite sekolah untuk memadukan data dengan hasil PKKS.

Obyek penilaian kinerja kepala sekolah sebanyak 7 (tujuh) Sekolah Menengah baik SMA maupun SMK pada sekolah binaan pengawas. PKKS menitikberatkan pada dua pelaksanaan tugas utama yaitu manajerial dan supervisi yang terdiri dari 7 komponen, 40 indikator.

Metode Pengumpulan Data

Pendekatan dan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data primer dalam penilaian kinerja kepala sekolah yaitu kolaborasi, dengan metode: observasi, studi dokumen, dan wawancara. Pendekatan kolaborasi yang dimaksud penilai (pengawas sekolah) memberi kesempatan kepada yang dinilai (kepala sekolah) untuk menjelaskan apa yang telah dikerjakan dan hasil kerja/prestasi kerja yang telah dicapai. Metode observasi digunakan untuk mengamati bukti fisik yang tidak terdokumentasi namun telah dilakukan.

Studi dokumen digunakan untuk memperoleh kebenaran data yang telah terdokumentasi. Sedangkan wawancara dilakukan untuk menggali/menanyakan lebih lanjut apa saja yang telah dilakukan, dan bagaimana proses cara melakukannya sehingga diperoleh hasil kerja itu. Selain itu kepala sekolah diberi kesempatan pertama untuk memahami instrumen PKKS terkait indikator penilaian dan rubriknya sesuai yang telah dilaksanakan dan disertai bukti fisik untuk menilai dirinya sendiri. Kemudian pengawas sekolah selaku penilai memverifikasi kebenaran dan kelayakan bukti fisik terhadap pencapaian indikator, selanjutnya penilai memberikan penilaiannya dan mengevaluasi tingkat keberhasilannya.

Indikator Keberhasilan

Kriteria keberhasilan yang sesuai dengan tujuan penelitian ini adalah mengatasi rendahnya kinerja kepala sekolah melalui pembinaan dan pendampingan supervisi manajerial pada peserta pembinaan dan pendampingan bagi kepala sekolah binaan di SMA/SMK Kabupaten Kulon Progo.

Kriteria keberhasilan terdiri dari empat kelompok seperti yang tercantum pada Kriteria keberhasilan dalam standar Kemendiknas, ke tiga unsur tersebut seperti table berikut.

Tabel 1. Kriteria Keberhasilan Peserta sebagai Kepala Sekolah Binaan

No.	(K) Prosentase Keberhasilan Peserta	Klasifikasi
1	$91 \% \leq K \leq 100 \%$	Baik Sekali
2	$76 \% \leq K < 90 \%$	Baik
3	$61 \% \leq K < 76 \%$	Cukup
4	$51 \% \leq K < 60 \%$	Sedang
5	$K < 51 \%$	Kurang

Cara Pengambilan Kesimpulan

Penelitian dianggap berhasil, apabila terjadi perubahan sikap dan tingkah laku peserta pembinaan dan pendampingan dalam mengikuti pembinaan dan pembimbingan PKKS. Dengan arti kata dari hari ke hari dalam proses kegiatan

pendampingan dan pembinaan para peserta pembinaan dan pendampingan selalu termotivasi untuk melaksanakan tupoksinya menjadi semakin baik seperti yang diamanatkan dalam Instrumen PKKS.

Hal ini dapat dilihat dari hasil analisa data kuantitatif yang menunjukkan bahwa hasil untuk pendampingan dan pembinaan selalu bertambah dari pra siklus ke siklus berikutnya, dan dapat juga dilihat dari hasil analisa data kualitatif yang menunjukkan bahwa prosentase rekapitulasi hasil observasi selama kegiatan pembinaan dan pendampingan selalu meningkat dari siklus pertama ke siklus berikutnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum dilakukan kinerja, seluruh Kepala sekolah SMA/SMK, diundang di Dinas Pendidikan untuk menerima sosialisasi tentang PKKS, langkah selanjutnya pengawas Pembina melakukan kros cek ke masing-masing sekolah binaan. Dari hasil diskusi, ditentukan langkah berikutnya yang disepakati bersama untuk mengadakan pembinaan terhadap setiap komponen bimbingan dari program perencanaan, pelaksanaan rencana kerja, program pengawasan dan Evaluasi, Akreditasi sekolah dan SIM. Dijelaskan bukti fisik pendukung untuk masing-masing komponennya. Kepala sekolah mengadakan rapat koordinasi untuk mempersiapkan bukti fisik dengan jalan membagi tugas ke guru-guru sesuai dengan keahliannya. Setelah bukti fisik disiapkan, langkah selanjutnya kepala sekolah mengundang pengawas Pembina untuk melakukan penilaian terhadap data pendukung yang sudah ada. Dalam tahap ini terjadi diskusi dan konsultasi tentang hal-hal yang sudah disiapkan atau atau hal-hal yang belum dipahami. Setelah mengetahui apa saja yang belum dibuat, yang bersangkutan mencari bukti fisik yang masih kurang. Pada tahap ini pengawas Pembina melakukan pembinaan

menggunakan rubrik PKKS. Hasil pembinaan tertera pada table berikut.

Tabel 2. Hasil Pembinaan Kinerja 7 Kepala Sekolah Binaan.

No	Nama Kepala Sekolah	Sekolah	Nilai Pembinaan PKKS	Kualifikasi
1	Responden I	SMK A	-	-
2	Responden II	SMK B	-	-
3	Responden III	SMK C	77	B
4	Responden IV	SMK D	50	K
5	Responden V	SMK E	83	B
6	Responden VI	SMK F	77	B
7	Responden VII	SMK G	77	B
Rata-rata =			73	

1. Siklus Pertama:

- a. Rencana: sesuai dengan rencana penyajian
- b. Pelaksanaan: Setiap tindakan dalam melaksanakan pendampingan PKKS menggunakan langkah pendekatan sebagai berikut.

1) Pertemuan Pertama

- a) diskusi dan konsultasi tentang hal-hal yang sudah disiapkan atau hal-hal yang belum dipahami.
- b) Setelah mengetahui apa saja yang belum dibuat, yang bersangkutan mencari bukti fisik yang masih kurang.
- c) Pengawas Pembina melakukan pendampingan menggunakan instrument pendampingan PKKS.
- d) diskusi dan konsultasi tentang hal-hal yang belum dipahami.
- e) Pengawas Pembina memberi penugasan kepada masing-masing penanggung jawab komponen untuk menyiapkan bukti fisik yang belum ada.

2) Pertemuan ke dua: menanyakan hasil penugasan pelaksanaan pendampingan pada pertemuan pertama.

c. Pengamatan/ Penilaian:

1) Pertemuan Pertama

- a) Pengawas sekolah melakukan kros cek antara bukti fisik yang disiapkan masing-

masing penanggung jawab program dengan rubrik Penilaian kepemimpinan Kepala Sekolah

- b) Pengawas sekolah melakukan kros cek antara bukti fisik yang disiapkan masing-masing penanggung jawab program dengan rubrik Penilaian PKKS

c) Menyepakati waktu pendampingan.

- 2) Pertemuan ke dua: dilakukan simulasi PKKS menggunakan instrument yang sudah disepakati.

d. Refleksi:

Hasil refleksi terhadap proses pendampingan menunjukkan bahwa masih ada sekolah yang:

- 1) Datanya tentang komponen dalam mengembangkan hubungan dengan DUDI tidak lengkap.
- 2) Dalam penyusunan rencana Pengelolaan Sekolah belum melalui pelatihan Tim Pengembang Sekolah.
- 3) Datanya tentang Pengelolaan Sekolah, dokumen pengelolaan/ pendayagunaan sarpras dan dokumen pengelolaan Tenaga Administrasi Sekolah tidak lengkap.
- 4) Pencapaian prestasi pendidik dan tenaga kependidikannya sangat minim.
- 5) Kepala sekolahnya belum melakukan Penelitian Tindakan Sekolah.
- 6) Datanya tentang penilaian dan tindak lanjut kegiatan supervise tidak lengkap.

Sehingga kepala sekolah menyambut positif kegiatan pendampingan yang dilakukan pengawas Pembina.

2. Siklus ke dua:

- a. Rencana: sesuai dengan rencana penyajian
- b. Pelaksanaan: Setiap tindakan dalam melaksanakan pendampingan PKKS menggunakan langkah pendekatan sebagai berikut.

1) Pertemuan Pertama

- a) diskusi dan konsultasi tentang hal-hal yang sudah disiapkan atau hal-hal yang belum dipahami.

- b) Pengawas Pembina melakukan pendampingan menggunakan instrument pendampingan PKKS.
 - c) diskusi dan konsultasi tentang hal-hal yang belum dipahami.
 - d) Pengawas Pembina memberi penugasan kepada masing-masing penanggung jawab komponen untuk menyiapkan bukti fisik yang belum ada.
- 2) Pertemuan ke dua:
- a) Mmenanyakan hasil penugasan pelaksanaan pendampingan pada pertemuan pertama.
 - b) Menyepakati waktu simulasi penilaian
- c. Pengamatan/ Penilaian:
- 1) Pertemuan Pertama
 - a) Pengawas sekolah melakukan kros cek antara bukti fisik yang disiapkan masing-masing penanggung jawab program dengan rubrik Penilaian kepemimpinan Kepala Sekolah.
 - b) Pengawas sekolah melakukan kros cek antara bukti fisik yang disiapkan masing-masing penanggung jawab program dengan rubrik Penilaian PKKS.
 - c) Menyepakati waktu pendampingan.
 - 2) Pertemuan ke dua
 - a) Pengawas sekolah melakukan simulasi penilaian terhadap Kepemimpinan Kepala Sekolah, dan PKKS menggunakan instrument yang sudah disepakati.
 - b) Hasil simulasi penilaian terhadap Pengelolaan Sekolah tertera pada table berikut.
- d. Refleksi: Hasil refleksi terhadap proses pendampingan menunjukkan bahwa masih ada sekolah yang:
- 1) Datanya tentang komponen dalam mengembangkan hubungan dengan DUDI tidak lengkap.
 - 2) Kepala sekolahnya belum melakukan Penelitian Tindakan Sekolah.

Setelah dilakukan pendampingan sebanyak 2 siklus 2 kali pertemuan diperoleh peningkatan hasil penilaian kinerja kepala sekolah seperti yang tertera pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. Peningkatan Hasil Penilaian Kinerja 7 Kepala Sekolah Binaan Masing-masing Siklus

No	Nama Kepala Sekolah	Sekolah	Nilai Siklus I	Nilai Siklus II	Kenaikan Nilai PKKS
1	Responden I	SMK A	-	-	-
2	Responden II	SMK B	-	-	-
3	Responden III	SMK C	50	69	19
4	Responden IV	SMK D	77	84	7
5	Responden V	SMK E	83	84	1
6	Responden VI	SMK F	77	85	8
7	Responden VII	SMK G	77	86	9
Rata-rata =			72,80	81,60	

Dari hasil PKKS yang dilakukan terhadap 5(lima) kepala sekolah binaan di atas, setelah didampingi dapat diidentifikasi sebagai berikut. Secara keseluruhan rata-rata nilai kinerja kepala sekolah mencapai nilai baik sebesar 81,60.

Pencapaian kinerja per individu dari seluruh kepala sekolah yaitu: yang memperoleh nilai kategori amat baik tidak ada, nilai baik sebanyak 4(empat) orang, 1 orang kategori cukup. Rata-ratanilai kinerja 82.

Pembahasan dan Pengambilan Kesimpulan

Hasil PKKS perlu ditindaklanjuti melauai pembinaan oleh pihak terkait sesuai tingkat kewenangannya. Kepala sekolah perlu diberikan bimbingan teknis dan pembinaan oleh pengawas sekolah melalui supervise manajerial terutama kinerja kepala sekolah dalam kategori cukup.

Metode dan teknik yang digunakan yaitu monitoring dan evaluasi dengan teknik individual, mengingat permasalahan yang dihadapi masing-masing kepala sekolah tidak sama.

Dinas Pendidikan kabupaten Kulon progo dapat menindaklanjuti hasil PKKS terutama dimensi pengelolaan sekolah bagi kepala SMA/SMK yang perolehan nilainya belum baik.

PENUTUP

Simpulan

Dari hasil penelitian tentang Meningkatkan Kompetensi Kepala Sekolah dalam Pengelolaan Sekolah melalui pendampingan penilaian kinerja kepala sekolah disimpulkan bahwa:

1. Kinerja kepala sekolah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya khususnya pada tugas Pengelolaan Sekolah pada 5 (lima) sekolah binaan rata-rata 82,00 pada kategori Baik. Dari tujuh kepala sekolah, 2 orang tidak dilakukan PKKS karena menjabat sebagai pelaksana tugas harian dan kepala sekolah baru. Lima orang dinilai kinerjanya dengan hasil empat orang kategori baik, dan satu orang kategori cukup. Masih perlu ditingkatkan melalui pendampingan oleh pengawas sekolah.
2. Tindak lanjut hasil PKKS meliputi Pencapaian indikator kinerja kepala sekolah meliputi:
 - a. kepala sekolah yang perolehan nilai kinerjanya baik ada pada komponen/unsur tugas utama manajerial indikator 1 sebesar 95%, indikator 2 sebesar 95,00%, indikator 6 sebesar 95%, indikator 7 sebesar 95%, kepala sekolah tersebut bisa diberi reward sebagai motivasi kepala sekolah lain yang nilai kinerjanya belum baik.
 - b. Kepala sekolah yang perolehan nilai kinerjanya kategori belum baik ada pada komponen: 1). Kepala sekolah dalam melakukan pembinaan prestasi unggulan dan pelacakan terhadap alumni (indicator lima sebesar 70%0; 2). Kepala sekolah dalam menindaklanjuti hasil supervise (indicator 16 sebesar 65%); 3). Kepala sekolah dalam melakukan evaluasi diri

sekolah (EDS) (indicator 17 sebesar 65%); 4). Kepala sekolah dalam pendayagunaan pencapaian prestasi pendidik dan tenaga kependidikan (indicator 18sebesar 70%).

- c. Tindak lanjut terhadap hasil kinerja kepala sekolah yaitu perlu dilakukan pelatihan Pengelolaan Sekolah, pengembangan dimensi kompetensi manajerial dan supervisi bagi kepala sekolah yang nilai kinerjanya belum baik oleh Dinas Pendidikan terkait. Kepala sekolah yang nilai kinerjanya sudah baik dapat diperhitungkan dalam usul kenaikan pangkat.
- d. Secara keseluruhan kinerja kepala sekolah yang masih perlu ditingkatkan adalah komponen supervisi kepala sekolah dan Pengelolaan Sekolah serta komponen Penampilan, Pelayanan, dan Prestasi.

Saran

Bagi Kepala Sekolah

- a. Kepala sekolah yang termasuk dalam kategori sudah baik/memenuhi standar minimal selanjutnya mengikuti kegiatan Pengembangan Keprofesionalan Berkelanjutan (PKB) sesuai dengan rekomendasi hasil Penilaian Kinerja (PK), dan dapat dipertimbangkan untuk penghitungan angka kredit sesuai dengan kinerjanya.
- b. Kepala sekolah yang termasuk dalam kategori belum baik/belum memenuhi standar minimal perlu mengikuti PKB sesuai dengan rekomendasi hasil PK untuk memperbaiki kinerjanya pada unsur yang belum memenuhi standar.

Bagi Pengambil Kebijakan

Balai Pendidikan Menengah terkait perlu memfasilitasi pelatihan/workshop manajemen dan supervisi bagi kepala SMK, yang dapat diperluas/dikembangkan sasarannya pada seluruh kepala SMA, dan SMK di Kabupaten Kulon Progo.

DAFTAR PUSTAKA

- Depdiknas, *Penilaian Kinerja Kepala Sekolah*. Jakarta: Ditjen PMPTK-Direktorat Tenaga Kependidikan, 2008.
- Giyarsih. 2012. *Meningkatkan Kinerja Kepala Sekolah dalam Melaksanakan Supervisi melalui Pendampingan di Tiga SMK Binaan kabupaten Kulon Progo tahun 2012*. Yogyakarta: Perdana.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Pedoman Penilaian Kinerja Kepala Sekolah/Madrasah*. Jakarta: BPSDMPK dan PMP-P2TK, 2012.
- Permendiknas Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah.
- Permendiknas Nomor 13 tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah
- Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan
- Permendiknas Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah